



LAPORAN KINERJA KPP PRATAMA SOREANG

2024

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga KPP Pratama Soreang senantiasa dapat melaksanakan tugas selama periode 2024.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, KPP Pratama Soreang menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan terhadap publik dan para stakeholders.

Laporan Kinerja KPP Pratama Soreang tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai pencapaian Sasaran Strategis pada tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three tahun 2024 KPP Pratama Soreang dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh KPP Pratama Soreang dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan selama tahun 2024.

Kami berharap visi DJP “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” mampu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Soreang dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Soreang yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini. Semoga di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan guna mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Bandung Barat, 31 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Gunung Herminto Siswanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tugas dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi, Wilayah Kerja, dan Sumber Daya Manusia.....	7
1. Struktur Organisasi.....	7
2. Wilayah Kerja	10
3. Sumber Daya Manusia	12
D. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
1. Visi Direktorat Jenderal Pajak.....	16
2. Misi Direktorat Jenderal Pajak	17
3. Nilai – Nilai Kementerian Keuangan	17
4. Tujuan	19
5. Sasaran.....	19
6. Motto	20
B. Rencana Kerja Tahunan.....	20
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi	23
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	25
1. Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal. 25	
2. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	28
3. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi.....	31

4. Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	33
5. Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa	35
6. Sasaran Strategis Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif	37
7. Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif	42
8. Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas	49
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.....	52
10. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	57
C. Akuntabilitas Keuangan	60
BAB IV PERMASALAHAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	61
A. Identifikasi Permasalahan.....	61
1. Permasalahan yang Bersumber dari Lingkungan Eksternal	61
2. Permasalahan yang Bersumber dari Lingkungan Internal	62
B. Strategi Dan Kebijakan	63
1. Fokus Strategi	63
2. Perkembangan Sumber Daya	63
BAB V PENUTUP	64
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tahun 2024 yang disajikan dalam bentuk LAKIN sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang berkedudukan di Jalan Raya Cimareme No. 205 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang mulai menerapkan Sistem Administrasi Modern sejak tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, tugas utama KPP Pratama adalah “Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan terhadap Wajib Pajak tertentu di wilayah kerjanya”.

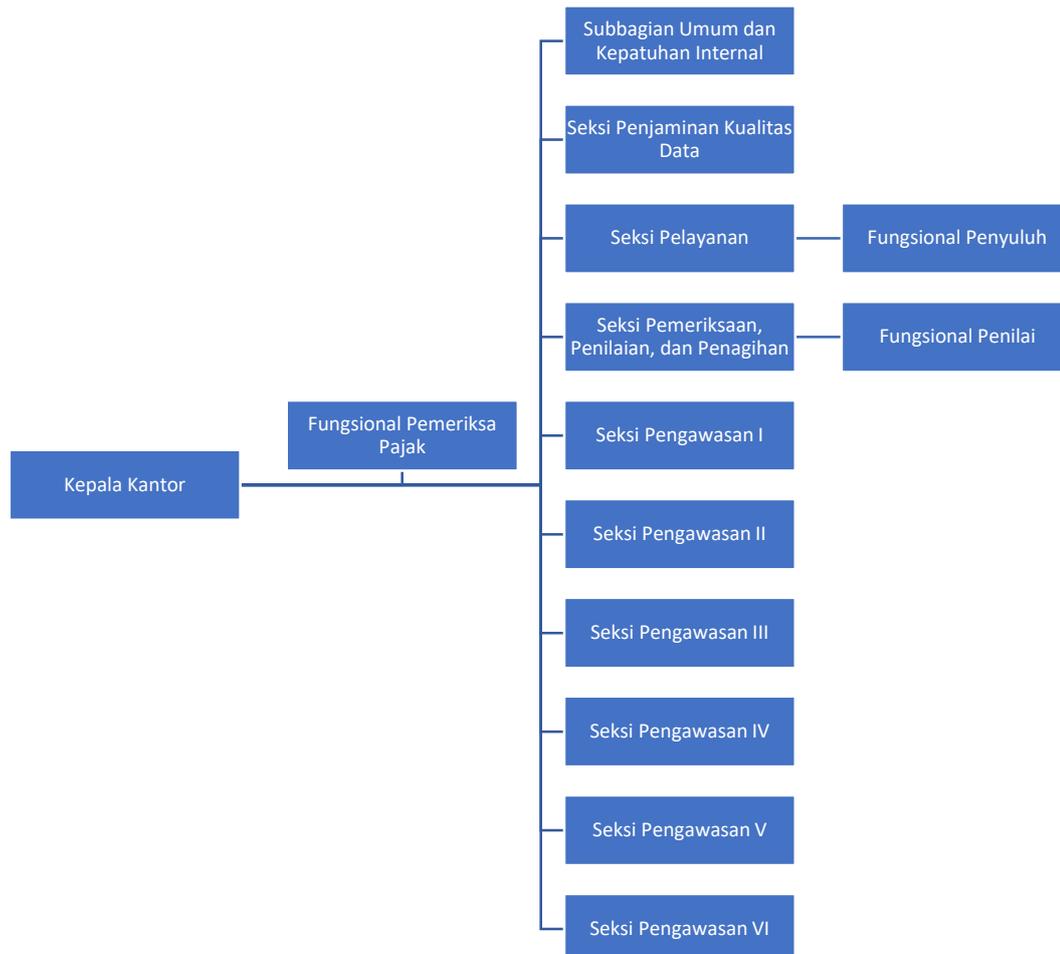
Untuk menjalankan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi:

1. Pelayanan Perpajakan
 - Pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta dokumen perpajakan lainnya.
 - Pelayanan terkait pengembalian pajak (restitusi).
 - Penyediaan informasi dan konsultasi perpajakan bagi wajib pajak.
2. Pengawasan Kepatuhan Pajak
 - Melakukan monitoring dan analisis kepatuhan wajib pajak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan kepatuhan dan kebenaran pelaporan pajak.
 - Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.
3. Penagihan Pajak
 - Mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) jika ditemukan pajak kurang bayar.
 - Melakukan tindakan penagihan pajak, seperti penyitaan aset atau pemblokiran rekening wajib pajak yang tidak patuh.
4. Penegakan Hukum Pajak
 - Melaksanakan tindakan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
 - Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
 - Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.
5. Penyuluhan dan Edukasi Pajak
 - Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
 - Meningkatkan kesadaran pajak melalui program bimbingan kepada wajib pajak.

C. Struktur Organisasi, Wilayah Kerja, dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPP Pratama Soreang mempunyai struktur organisasi terdiri dari:



Bagan 1: Struktur Organisasi KPP Pratama Soreang

Diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

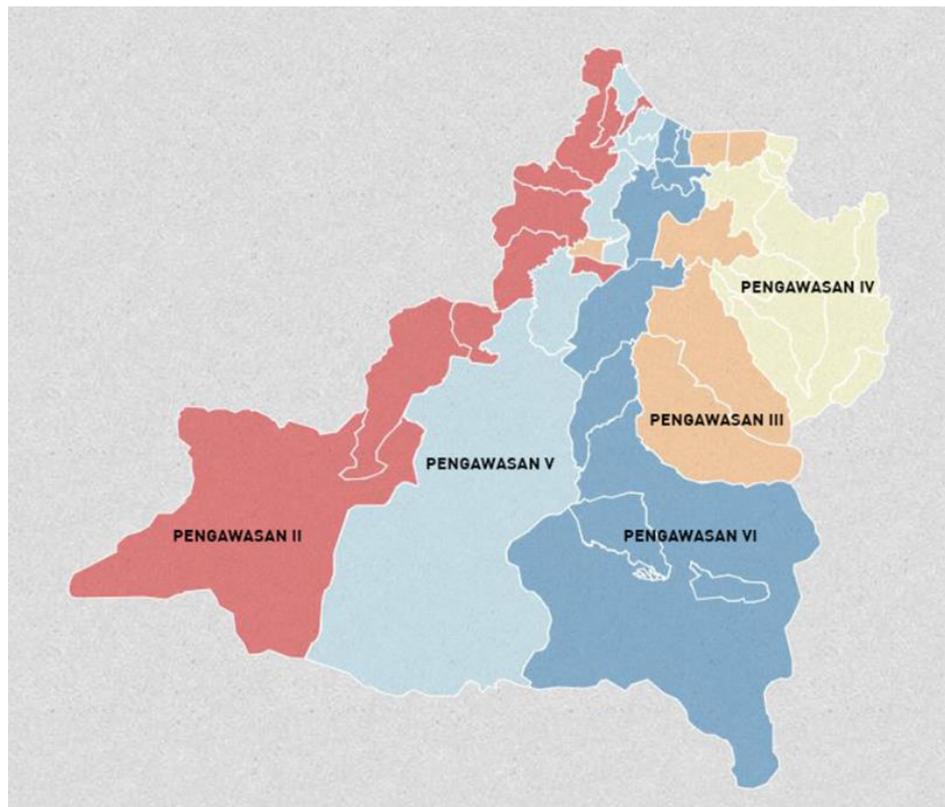
Direktorat Jenderal Pajak maka Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menetapkan tugas dan fungsi Eselon III ke bawah pada instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- d. Seksi Pengawasan I mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan atas Wajib Pajak Strategis.
- e. Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan atas Wajib Pajak Kewilayahan.

- f. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Wilayah Kerja



Wilayah kerja KPP Pratama Soreang meliputi wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dengan lingkup wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri atas 16 kecamatan dengan 134 Desa/Kelurahan

yang dilakukan pengawasan oleh 6 (enam) Seksi Pengawasan di KPP Pratama Soreang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Seksi	Wilayah Kerja	
		Kecamatan	Kelurahan
1.	Seksi Pengawasan I	Wajib Pajak Strategis	Wajib Pajak Strategis
		Ciwidey	Lebak Muncang Nengkelan Rawabogo Sukawening
2.	Seksi Pengawasan II	Kutawaringin	Buninagara Cibodas Cilame Gajah Mekar Jatisari Jelegong Kutawaringin Padasuka Sukamulya
			Margaasih
		Rancabali	Alamendah Cipelah Indragiri Patengan Sukaresmi
		Soreang	Soreang
		Banjaran	Banjaran Banjaran Wetan Clapus Kamasan Klang Roke Marga Hurip Mekarjaya Neglasari Pasirmulya Sindangpanon Tarajusari
3.	Seksi Pengawasan III	Cimaung	Campakamulya Cikalong Cimaung Ciplinang Jagabaya Mekarsari Pasirhuni Warjabakti
			Dayeuhkolot
		Margahayu	Sukamenak
		Pameungpeuk	Bojongkunci Bojongmangu Langonsari Ranca Tungku Rancamulya Sukasari
		Soreang	Pamekaran
4.	Seksi Pengawasan IV	Arjasari	Ancolmekar Arjasari Baros Batukarut Lebakwangi Mangunjaya Mekarjaya Patrolsari Pinggirsari Rancakole Wargaluyu
			Baleendah
		Dayeuhkolot	Citeureup Dayeuhkolot Sukapura

No	Nama Seksi	Wilayah Kerja	
		Kecamatan	Kelurahan
5.	Seksi Pengawasan V	Ciwidey	Ciwidey Panundaan Panyocokan
		Kutawaringin	Kopo Pameuntasan
		Margaasih	Margaasih Mekar Rahayu Rahayu
		Pasirjambu	Cibodas Cikoneng Cisondari Cukanggenteng Margamulya Mekarmaju Mekarsari Pasir Jambu Sugihmukti Tenjolaya
		Soreang	Cingcin Karamat Mulya Panyirapan Parungserab Sadu Sekarwangi Sukajadi Sukanagara
6.	Seksi Pengawasan VI	Cangkuang	Bandasari Cangkuang Ciluncat Jatisari Nagrak Pananjung Tanjungasari
			Cimaung
		Katapang	Banyusari Cilampeni Gandasari Katapang Pangauban Sangkan Hurip Sukamukti
		Margahayu	Margahayu Selatan Margahayu Tengah Sayati Suleman
		Pangalengan	Banjarsari Danau Lamajang Margaluyu Margaekar Margamukti Margamulya Pangalengan Pulosari Sukaluyu Sukamanah Tribakti Mulya Wanasuka Warnasari

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Wajib Pajak
Orang Pribadi	502.969
Badan	22.322
Pemungut	512
Total	525.803

Sumber Daya Manusia (SDM) Tersedianya sumber daya manusia dan didukung dengan penerapan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik ini diawasi oleh Komite Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang s/d akhir tahun 2024 sebanyak 104 orang dengan pembagian tiap seksi sebagai berikut:

No	Seksi	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Kepala Kantor	-	-	1	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	8	2	-	10
3	Penjaminan Kualitas Data	2	2	-	4
4	Pelayanan	4	15	1	20
5	Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	3	5	1	9
6	Pengawasan I	-	9	1	10
7	Pengawasan II	2	6	-	8
8	Pengawasan III	1	5	1	7
9	Pengawasan IV	-	6	1	7

No	Seksi	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
10	Pengawasan V	1	5	1	7
11	Pengawasan VI	-	6	1	7
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	5	8	1	14
Jumlah		26	69	9	104

Dengan Rincian:

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
Eselon III	1	-	1	1%
Eselon IV	5	5	10	10%
Account Representative	21	18	39	38%
Juru Sita	2	1	3	3%
Sekretaris	-	1	1	1%
Bendahara	-	1	1	1%
Pelaksana	14	15	29	28%
Kelompok Fungsional	17	3	20	19%
Jumlah	60	44	104	100%

Pangkat/ Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
Pembina Tk.I/IVb	1	-	1	1%
Pembina Utama Muda/IVc	1	-	1	1%
Pembina/IVa	4	3	7	7%
Penata Muda Tk.I/IIIb	14	2	16	15%
Penata Muda/IIIa	7	5	12	12%
Penata Tk.I/IIId	10	7	17	16%
Penata/IIIc	12	12	24	23%
Pengatur Muda Tk.I/IIb	2	7	9	9%
Pengatur Tk.I/IIId7	7	5	12	12%
Pengatur/IIc	2	3	5	5%
Jumlah	60	44	104	100%

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA/Sederajat	3	3%
Diploma I	15	14%
Diploma III	16	15%
Sarjana/Diploma IV	60	58%
Magister	10	10%
Jumlah	104	100%

Usia	Jumlah	Persentase (%)
Usia 20-30 tahun	20	19%
Usia 31-40 tahun	37	36%
Usia 41-50 tahun	22	21%
Usia >50 tahun	25	24%
Jumlah	104	100%

D. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPP Pratama Soreang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar	Berisi puji dan syukur Kepala Kantor atas penyelesaian kinerja tahun 2024 dan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2024.
Daftar Isi	Panduan untuk mengetahui halaman dan muatan pada Laporan Kinerja
Bab I	Pendahuluan
	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:
A.	Latar Belakang
	Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja.
B.	Tugas dan Fungsi
	Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sampai dengan akhir Tahun 2024.
C.	Struktur Organisasi, Wilayah Kerja, dan Sumber Daya Manusia
	Menguraikan Struktur Organisasi KPP Pratama Soreang sampai dengan akhir Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menguraikan Wilayah Kerja KPP Pratama Soreang. Menguraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit KPP Pratama Soreang dengan memperhatikan Gender Equality.

	D. Sistematika Laporan
	Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.
Bab II	Perencanaan Kinerja
	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:
	A. Rencana Strategis
	Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Berisi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, nilai-nilai Kementerian Keuangan, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pajak serta motto KPP Pratama Soreang.
	B. Rencana Kerja Tahunan
	Berisi indikator kinerja dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan.
	C. Penetapan Kinerja
	Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024
Bab III	Akuntabilitas Kinerja
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi
	Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun.
	B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
	Pada sub bab ini diuraikan perhitungan realisasi masing-masing IKU sesuai dengan Sasaran Strategis serta tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU dapat tercapai.
	C. Akuntabilitas Keuangan
	Pada subbab ini dilampirkan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja sampai dengan 31 Desember 2024.
Bab IV	Permasalahan, Strategi dan Kebijakan
	A. Identifikasi Permasalahan
	Pada sub bab ini diuraikan permasalahan-permasalahan yang harus diantisipasi pada tahun 2024
	B. Strategi dan Kebijakan
	Pada sub bab ini diuraikan strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang bisa mengancam gagal kinerja.
Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran	Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dalam menyusun Visi, Misi, dan Renstranya mengacu pada Renstra induk organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

A. Rencana Strategis

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi DJP adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas

dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

3. Nilai – Nilai Kementerian Keuangan

Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan menjadi 10 (sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu:

Nilai-Nilai	Makna	Kaidah Perilaku Utama
Integritas	Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	<ul style="list-style-type: none"> Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
Profesionalisme	Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; Bekerja dengan hati.
Sinergi	Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
Pelayanan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	<ul style="list-style-type: none"> Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

Kesempurnaan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	a. Melakukan perbaikan terus-menerus.
--------------	---	---------------------------------------

4. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

5. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a) Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Berdasarkan uraian di atas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang mempunyai Sasaran yaitu tercapainya Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2024.

6. Motto

Motto KPP Pratama Soreang adalah “PRIMA”: Profesional, Ramah, Integritas, Mudah, Akurat.

B. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang hendak dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang telah dicanangkan dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2024.

Sasaran Strategis dapat bersifat *output/outcome* (sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai), bersifat proses (mengenai apa yang ingin dilakukan), dan bersifat input (mengenai apa yang seharusnya kita miliki).

Sedangkan Indikator Kinerja adalah merupakan ukuran kuantitatif/kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan yang memenuhi kriteria SMART-C, yaitu:

- a. spesifik;
- b. terukur;
- c. dapat dicapai;
- d. sesuai Visi dan Misi serta tujuan strategis organisasi;
- e. memiliki batas waktu pencapaian;
- f. sesuai perkembangan strategi organisasi.

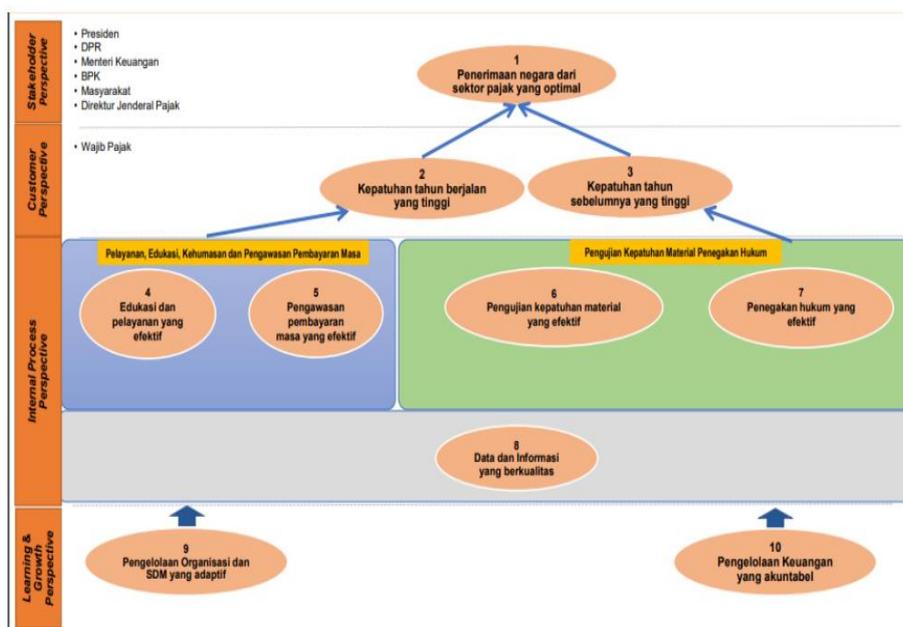
Untuk mengetahui pencapaian sasaran, perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Adapun realisasi dan target Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang pada Tahun 2024 dapat dilihat dalam form Capaian IKU Tahun 2024.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perjanjian kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Sasaran Strategis tersebut di atas kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPP Pratama Soreang tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-20/WPJ.09/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana diagram berikut:



Dalam Perjanjian Kinerja, juga dituangkan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Soreang tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	
		%	Angka Mutlak
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	1.349.997.100.000
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	-
<i>Customer Perspective</i>			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	1.234.720.604.000
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	85.615
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	115.276.496.000
<i>Internal Process Perspective</i>			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	-
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	-
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	1
8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	-
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	-
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif		
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	-
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi

Evaluasi kinerja tergambar dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada laporan ini. Saat ini, penerimaan pajak merupakan tulang punggung dari penerimaan negara sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu diupayakan pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak, KPP Pratama Soreang telah berupaya untuk dapat merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Indeks Capaian
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
Stakeholder Perspective						102,78
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					102,78
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	1.349.997.100.000	100,48%	1.190.289.688.533	100,48
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	105,93%	-	105,93
Customer Perspective						100,46
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					100,38
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	1.234.720.604.000	100,47%	98.617	100,47
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	85.615	100,26%	1.099.717.904.717	100,26
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					100,53
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	115.276.496.000	100,53%	90.566.383.816	100,53
Internal Process Perspective						116,87
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif					113,81

4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%	-	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	-	107,62%	-	107,62
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif					120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	118,41%	-	120,00
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif					118,36
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%	-	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120%	-	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	115,10%	-	115,10
7	Penegakan hukum yang efektif					112,19
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	120%	-	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	88,99%	-	118,65
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	1	100%	-	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas					120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	-	120%	-	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	84%	-	120,00
Learning & Growth Perspective						115,97
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					111,94
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	-	117,45%	-	117,45
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	-	93,70%	-	110,24
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	-	97,34%	-	108,15
10	Pengelolaan Keuangan yang optimal					120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	120%	-	120,00
NILAI KINERJA ORGANISASI						109,13

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

KPP PRATAMA SOREANG	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal						
	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15,00%	40,00%	40,00%	65,00%	65,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,29%	39,24%	39,24%	67,02%	67,02%	100,48%	100,48%
Capaian	115,27	98,10	98,10	103,11	103,11	100,48	100,48

Target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor KEP-295/WPJ.09/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor KEP-77/WPJ.09/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.349.997.100.000,-. Dari target tersebut total penerimaan netto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah sebesar Rp1.356.459.534.721,- (100.48%) Realisasi Penerimaan Bruto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah sebesar Rp1.412.496.388.553,-. Dari jumlah tersebut nilai SPMKP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang adalah Rp56.036.853.832,-. Rincian realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Soreang adalah sebagai berikut:

URAIAN	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN						
	TARGET	BRUTO	SPMKP	NETTO	NETTO TAHUN LALU	PENCAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)
A. Pajak Penghasilan	607.735.643.000	600.544.939.151	3.116.331.406	597.428.607.745	526.839.237.206	98.30	13.40
1. PPh NON MIGAS	607.735.643.000	600.544.901.651	3.116.331.406	597.428.570.245	526.820.137.206	98.30	13.38
1.1 PPh Pasal 21	306.447.546.000	284.865.309.058	292.090.385	284.573.218.673	257.087.364.925	92.86	10.69
1.2 PPh Pasal 22	29.293.340.000	24.644.318.419	-	24.644.318.419	26.474.803.291	84.13	-6.91
1.3 PPh Pasal 22 Impor	16.054.764.000	26.059.576.112	-	26.059.576.112	15.210.272.230	162.32	71.33
1.4 PPh Pasal 23	34.330.185.000	32.506.362.414	-	32.506.362.414	30.994.537.103	94.69	4.88
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	20.208.524.000	17.870.505.806	172.055.793	17.698.450.013	16.799.384.749	87.58	5.35
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	83.658.367.000	93.950.989.504	2.523.486.588	91.427.502.916	75.262.983.822	109.29	21.48
1.7 PPh Pasal 26	5.125.449.000	4.347.504.905	-	4.347.504.905	4.562.371.268	84.82	-4.71
1.8 PPh Final	112.617.468.000	116.299.235.433	128.698.640	116.170.536.793	100.528.419.818	103.15	15.56
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	0.00	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	1.100.000	-	1.100.000	-	0.00	0.00
2. PPh MIGAS	-	375	-	375	80.900.000	0.00	100.05
2.1 PPh Minyak Bumi	-	-	-	-	80.900.000	0.00	100.00
2.2 PPh Gas Alam	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	375	-	375	-	0.00	0.00
B. PPN dan PPhBM	574.821.675.000	638.796.634.969	52.920.522.426	585.876.112.543	515.529.698.751	101.92	13.65
1. PPN Dalam Negeri	535.398.542.000	563.555.756.423	52.920.522.426	510.635.233.997	473.459.947.520	95.37	7.85
2. PPN Impor	39.260.729.000	74.616.831.686	-	74.616.831.686	36.867.676.539	190.05	102.39
3. PPhBM Dalam Negeri	-	192.245.723	-	192.245.723	148.196.997	0.00	29.72
4. PPhBM Impor	-	354.074.581	-	354.074.581	-	0.00	0.00
5. PPN Lainnya	81.202.000	77.677.056	-	77.677.056	71.155.440	95.66	9.17
6. PPhBM Lainnya	81.202.000	495	-	495	-	0.06	0.00
7. PPN DN DTP	-	-	-	-	4.982.722.255	0.00	-100.00
8. PPNBM DTP	-	-	-	-	-	0.00	0.00
C. PBB dan BPHTB	147.727.905.000	152.812.709.208	-	152.812.709.208	135.306.225.510	103.44	12.94
1. Pendapatan PBB	147.727.905.000	-	-	-	135.306.225.510	0.00	-100.00
a. PBB Perdesaan	-	-	-	-	-	0.00	0.00
b. PBB Perkotaan	-	-	-	-	-	0.00	0.00
c. PBB Perkebunan	15.084.288.000	28.512.136.491	-	28.512.136.491	13.310.426.013	189.02	114.21
d. PBB Kehutanan	258.578.000	-	-	-	517.931.803	0.00	-100.00
e. PBB Pertambangan Minerba	-	-	-	-	-	0.00	0.00
f. PBB Migas	132.385.039.000	-	-	-	-	0.00	0.00
g. PBB Pertambangan	-	124.300.572.717	-	124.300.572.717	121.477.867.694	0.00	2.32
h. PBB lainnya	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2. Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-	0.00	0.00
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	-	-	1.677.141.166	0.00	-100.00
1. PPh Pasal 21	-	-	-	-	664.706.815	0.00	-100.00
2. PPh Pasal 22	-	-	-	-	-	0.00	0.00
3. PPh pasal 22 Impor	-	-	-	-	-	0.00	0.00
4. PPh Pasal 23	-	-	-	-	-	0.00	0.00
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-	-	-	18.814.252	0.00	100.00
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	-	-	-	0.00	0.00
7. PPh Pasal 26	-	-	-	-	-	0.00	0.00
8. PPh Final	-	-	-	-	1.031.248.603	0.00	-100.00
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-	-	-	-	0.00	0.00
JUMLAH D	-	-	-	-	1.677.141.166	0.00	-100.00
E. Pajak Lainnya	19.711.877.000	20.342.105.225	-	20.342.105.225	19.119.413.964	103.20	6.40
1. Bea Meterai	127.430.000	112.987.000	-	112.987.000	123.600.100	88.67	-8.59
2. Penjualan Benda Meter	19.527.419.000	20.221.000.000	-	20.221.000.000	18.940.500.000	103.55	6.76
3. PTLL	661	6.726	-	6.726	64.116	101.75	4.90
4. Bunga Penagihan PPh	3.263.000	1.029.390	-	1.029.390	3.164.372	31.55	-67.47
5. Bunga Penagihan PPN	53.104.000	6.416.235	-	6.416.235	51.508.332	12.08	-87.54
6. Bunga Penagihan PPhB	-	-	-	-	-	0.00	0.00
7. Bunga Penagihan PTLL	-	-	-	-	-	0.00	0.00
8. PIB	-	-	-	-	-	0.00	0.00
9. PPN Batu Bara	-	-	-	-	-	0.00	0.00
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1.349.997.100.000	1.412.496.388.553	56.036.853.832	1.356.459.534.721	1.198.471.716.597	100.48	13.18

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat pengawasan dan evaluasi penerimaan pajak secara periodik dipimpin oleh Kepala Kantor;
 - 2) Pemanfaatan secara optimal alat bantu/aplikasi dalam rangka kegiatan pencapaian penerimaan atau penggalian potensi;
 - 3) Peningkatan kompetensi pegawai melalui IHT tematik;
 - 4) Dinamisasi setoran Wajib Pajak;
 - 5) Pengawasan kepatuhan pembayaran;
 - 6) Penggalian potensi melalui analisa Laporan Keuangan Wajib pajak tahun sebelumnya;
 - 7) Penggalian potensi pajak (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - 8) Menindaklanjuti data yang ada dalam sistem dan DPP dengan menerbitkan STP dan/atau SP2DK;
 - 9) Profiling dan visit Wajib Pajak;
- Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

KPP PRATAMA SOREANG	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal						
	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	109,37	109,57	109,57	106,68	106,68	105,93	105,93
Capaian	109,37	109,57	109,57	106,68	106,68	105,93	105,93

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari 50% dikali indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto, ditambah dengan 50% dikali indeks capaian presentase deviasi akurasi perencanaan kas. Persentase realisasi pertumbuhan KPP Pratama Soreang menunjukkan trend positif hal ini dapat terlihat dari capaian yang berhasil didapatkan KPP Pratama Soreang dari poin ini yaitu sebesar 111,86%. Data deviasi proyeksi perencanaan kas atas prognosa yang dikirim oleh KPP Pratama Soreang selama Triwulan I s.d. Triwulan IV mengalami deviasi yang akurat dengan standar $\leq 8\%$, dapat terlihat dari capaian yang berhasil didapatkan

KPP Pratama Soreang dari poin ini yaitu sebesar 100,00%. Sehingga capaian atas IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 105,93% dan telah menggunakan aplikasi Mandor sehingga menyamakan persepsi semua KPP dan mudah terpantau melalui aplikasi tersebut.

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard | IKU Pertumbuhan Bruto | IKU Deviasi Perencanaan Kas | Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Filter

Pertumbuhan Nasional: 5,02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
156 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	39.364.657.631.859	36.589.292.497.637	10,61%	110,61%	105,32%	107,44%
440 - PRATAMA SOREANG	1.412.496.300.953	1.226.563.227.594	15,16%	115,16%	109,65%	111,95%

TRIWULAN	Komponen Realisasi Growth Bruto	Komponen Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	Konversi Komponen Realisasi Growth Bruto	Konversi Komponen Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	Komponen Realisasi Growth Bruto (50%)	Komponen Deviasi Perencanaan Kas (50%)	Realisasi IKU
a	b	c	d = b (max. 120%)	e = c (max. 120%)	f = d x 50%	g = e x 50%	h = f + g
Triwulan IV	111,86%	100,00%	111,86%	100,00%	55,93%	50,00%	105,93%

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat pengawasan dan evaluasi penerimaan pajak secara periodik dipimpin oleh Kepala Kantor;
- 2) Rapat Komite Kepatuhan dalam rangka perhitungan prognosa penerimaan pajak ;
- 3) Pengawasan kepatuhan pembayaran dan memastikan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak;
- 4) Mengumpulkan informasi dari Seksi Pelayanan terkait prognosa restitusi setiap bulan;
- 5) Memastikan Realisasi penerimaan sesuai dengan prognosa yang telah dibuat.

2. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Sasaran strategis kepatuhan wajib pajak yang tinggi terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya:

- Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

KPP PRATAMA SOREANG	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15,00%	40,00%	40,00%	65,00%	65,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	16,60%	37,68%	37,68%	66,50%	66,50%	100,47%	100,47%
Capaian	110,67	94,20	94,20	102,31	102,31	100,47	100,47

IKU ini merupakan rincian atas penerimaan pajak yang diterima oleh Kantor Pajak, yang dimana kegiatan penerimaan dibagi menjadi dua yaitu PPM dan PKM, IKU PPM merupakan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Target penerimaan untuk kegiatan PPM sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor KEP-295/WPJ.09/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor KEP-77/WPJ.09/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.234.720.604.000,-. Dari target tersebut KPP Pratama Soreang berhasil mencapai realisasi sebesar Rp1.240.573.590.172,- dengan Realisasi IKU sebesar 100,47%, dengan rincian:

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pak

Data update terakhir: 21-01-2025 07:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
150 - KANWIL DJP JAWA BARAT I	33.984.193.015.000	34.021.460.528.298	100,11%	100,00%	100,11%
445 - PRATAMA SOREANG	1.234.720.604.000	1.240.573.590.172	100,47%	100,00%	100,47%

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

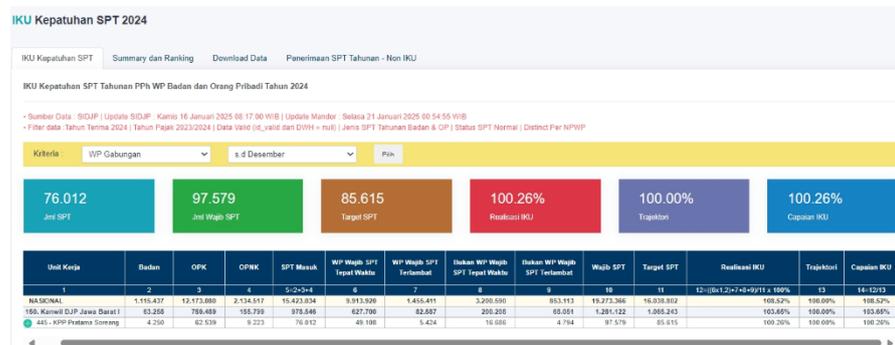
- 1) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi approweb;
 - 2) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi DRM;
 - 3) Penggalian potensi pajak (intensifikasi dan ekstensifikasi);
 - 4) Melakukan analisis dan profiling wajib pajak;
 - 5) Pengawasan/pengujian kepatuhan Wajib Pajak atas pembayaran pajak.
- Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KPP PRATAMA SOREANG	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	79,98%	90,27%	90,27%	91,48%	91,48%	100,26%	100,26%
Capaian	120,00	112,84	112,84	101,64	101,64	100,26	100,26

Sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor ND-2580/WPJ.09/2024 hal Perubahan Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mengakibatkan terjadinya perubahan target penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menjadi 85.144 SPT. Target penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis adalah 471 SPT, sehingga total target penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 KPP Pratama Soreang sebesar 85.615 SPT.

KPP Pratama Soreang telah melakukan sosialisasi-sosialisasi akan pentingnya penyampaian SPT Tahunan, Serta menerbitkan Surat Himbuan agar segera melakukan pelaporan SPT Tahunan. Jumlah SPT Masuk pada tahun 2024 mencapai 76.012 SPT atau sebesar 88,78% dari jumlah target. Namun dikarenakan formulasi penghitungan Realisasi IKU memberi nilai 1,2 pada kategori Wajib Pajak Wajib SPT melaporkan tepat waktu sejumlah 49.108 SPT maka dikonversikan menjadi 58.929,6 poin dengan kategori lainnya menghasilkan 26.904 poin maka total poin SPT sebesar 85.833,6

dibanding target 85.615, KPP Pratama Soreang berhasil mencapai Realisasi IKU sebesar 100,26%.



Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Satgas SPT Tahunan.;
 - 2) Membuka layanan khusus SPT tahunan di Desa/Kecamatan dan Mall Pelayanan Publik;
 - 3) Memberi himbauan penerbitan bukti potong kepada pemberi kerja, bendahara, pemerintah daerah kota/kabupaten;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada asosiasi, pemberi kerja, bendahara, pemerintah daerah kota/kabupaten;
 - 5) Memasang baliho atau banner di beberapa lokasi strategis;
 - 6) Melakukan publikasi melalui media social;
 - 7) Mengoptimalkan penerbitan Surat Teguran dan STP;
 - 8) Me-non-efektikan Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif.
3. Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
- Sasaran strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

KPP PRATAMA SOREANG	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	32,75%	63,42%	63,42%	73,32%	73,32%	100,53%	100,53%
Capaian	120,00	120,00	120,00	97,76	97,76	100,53	100,53

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM merupakan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan/Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yaitu penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengawasan/pengujian kepatuhan terhadap Wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024 dan sebelumnya).

Target penerimaan untuk kegiatan PKM sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor KEP-295/WPJ.09/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor KEP-77/WPJ.09/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp115.276.496.000,-. Dari target tersebut KPP Pratama Soreang berhasil mencapai realisasi sebesar Rp115.885.944.549,- dengan Realisasi IKU sebesar 100,53%, dengan rincian:

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Plus

Data update terakhir: 21-01-2025 07:58:20 WIB

Unit Kerja	PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
150 - KANWIL DJP JAWA BARAT I	2.780.858.159.000	2.795.573.168.933	100,53%	100,00%	100,53%
445 - PRATAMA SOREANG	115.276.496.000	115.885.944.549	100,53%	100,00%	100,53%

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari

kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK Outstanding;
- 2) Melakukan penggalian potensi pembayaran pajak sebelum tahun berjalan;
- 3) Melakukan penagihan terhadap WP yang statusnya masih "Dalam Pengawasan";
- 4) Menerbitkan surat teguran dan surat paksa serta tindakan penagihan lainnya atas WP yang masih mempunyai tunggakan pajak.

4. Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

KPP PRATAMA SOREANG	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	25,20%	81,60%	81,60%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki dasar penghitungan dengan komposisi Peyeleaian Kegiatan 25%, Perubahan Perilaku Lapor 30% dan Perubahan Perilaku Bayar 45%. KPP Pratama Soreang mendapat target sebesar 74,00% dari 100% dan KPP Pratama Soreang berhasil mencapai 88,80% dari 100% sehingga mendapatkan indeks capaian sebesar 120,00% dengan rincian:

Dashboard Penyuluhan Gunung Herminio Siswanoro

Dashboard Utama | Data Unit Kerja | Detail Data | Panduan | Penyuluhan 2023

Data Unit Kerja

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
445	PRATAMA SOREANG	100.00 %	18.50 %	110.91 %	28.12 %	80.91 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4304320000	KPP Pratama Soreang	100.00 %	18.50 %	110.91 %	28.12 %	80.91 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

445 - PRATAMA SOREANG

Kegiatan				Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU				
Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%	Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Trajektori	Realisasi			
Tema1	4	5	4	Bayar	110	89	80.91%	Kegiatan	100.00%	18.50%	Q1	10.00%	120.00%
Tema2	16	47	16	Lapor	110	122	110.91%	Perubahan Perilaku			Q2	40.00%	120.00%
Tema3				Σ Nominal Bayar			Bayar	80.91%	42.18%	Q3	60.00%	120.00%	
One to One	10	48	10	507,166,941.00			Lapor	110.91%	28.12%	Q4	74.00%	120.00%	
One to Many	10	18	10				Total		88.80%				
Total	40	118	40										

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara offline maupun online;
 - 2) Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak yang telah diberi penyuluhan agar terdapat perubahan perilaku pembayaran maupun pelaporan berdasarkan materi edukasi yang disampaikan.
- Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan

KPP PRATAMA SOREANG	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,23%	12,58%	12,58%	18,00%	18,00%	107,62%	107,62%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	107,62	107,62

IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Surveyor (Wajib Pajak). Terdapat beberapa aspek yang dihitung dalam IKU ini yaitu terkait pelayanan dan penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka, daring, dan saluran lain. Dari hasil

survey tersebut, KPP Pratama Soreang mendapat nilai 89,62%. hal ini sudah melebihi target yang diberikan yaitu nilai 85,00% sehingga mendapatkan indeks capaian sebesar 107,62%.

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU				
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil		
						Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil		
	KANWIL DJP JAWA BARAT I	90,42	89,38	85,03		87,27			90,48	108,46	
113	KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	89,49	89,24		89,36		92,63		110,93		
114	KPP MADYA OAH BANDUNG	91,24	93,29		87,29		90,46		108,45		
115	KPP PRATAMA SUKABUMI	89,69	85,49		87,59		90,79		108,79		
116	KPP PRATAMA SOREANG	91,95	89,95		86,45		89,52		107,82		
117	KPP PRATAMA CIMAH	91,73	89,25		89,04		92,30		110,30		
118	KPP PRATAMA PURWAKARTA	89,75	89,07		87,91		91,13		109,13		
119	KPP PRATAMA CIANJUR	94,77	89,80		92,29		95,66		113,66		
120	KPP PRATAMA BANDUNG CIBELUNYING	88,50	85,88		87,19		90,38		108,38		
121	KPP PRATAMA CIAMIS	88,10	83,10		85,60		88,73		106,99		
122	KPP PRATAMA MAJALAYA	90,69	88,16		89,57		92,85		110,85		
123	KPP MADYA BANDUNG	87,90	82,62		86,41		88,54		106,45		
124	KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA	91,41	84,59		88,00		91,22		109,22		
125	KPP PRATAMA BANDUNG CIGADIS	90,95	89,42		90,15		93,46		111,46		
126	KPP PRATAMA SUMEDANG	89,66	87,03		88,49		91,73		106,73		
127	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	88,54	89,91		87,73		90,93		108,93		
128	KPP PRATAMA GARUT	88,16	83,88		86,77		88,91		106,91		

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan prima sesuai strandar pelayanan kepada wajib pajak;
- 2) Mengadakan evaluasi kepada seluruh pegawai front office atas pelayanan yang diberikan.

5. Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa

KPP PRATAMA SOREANG	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	112,97%	112,97%	107,24%	107,24%	118,41%	118,41%
Capaian	120,00	120,00	120,00	119,16	119,16	120,00	120,00

Sasaran strategis pengawasan pembayaran masa terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- 1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya

Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

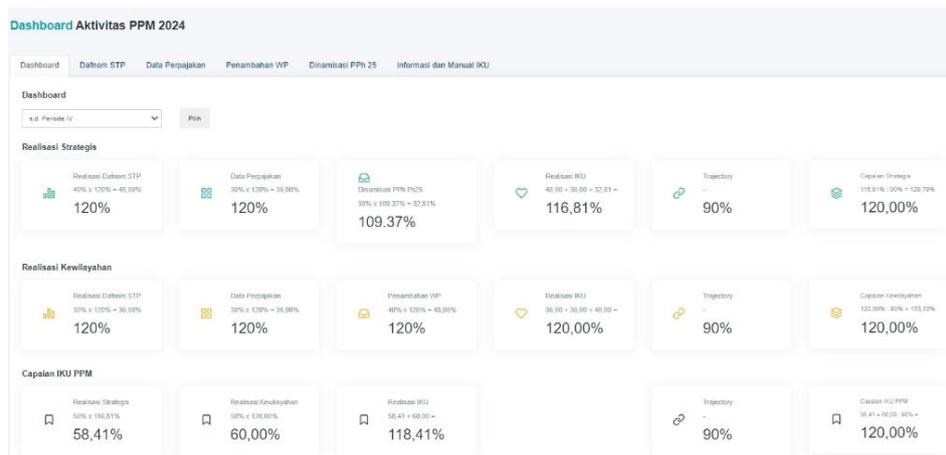
2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Perhitungan Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah:

$$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$$

KPP Pratama Soreang mendapat target sebesar 90,00% dan KPP Pratama Soreang berhasil mendapatkan realisasi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis sebesar 116,81% dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sebesar 120,00% sehingga mendapatkan realisasi IKU sebesar 118,41% dengan indeks capaian sebesar 120,00% dengan rincian:



Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh Daftar Nominatif SPT pada aplikasi Approweb telah ditindaklanjuti;
 - 2) Melaksanakan penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 sesuai atau lebih besar dengan nominal yang terdapat pada Surat Imbauan;
 - 3) Penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi;
 - 4) Melaksanakan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.
6. Sasaran Strategis Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif

Sasaran strategis pengawasan kepatuhan material yang efektif terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

KPP PRATAMA SOREANG	Pengawasan kepatuhan material yang efektif						
	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	-	117,31%	117,31%	113,76%	113,76%	120,00%	120,00%
Capaian	-	117,31	117,31	113,76	113,76	120,00	120,00

Variabel atas IKU ini Variabel IKU terdiri atas penyelesaian DPP (penerbitan LHPt) serta tindak lanjut atas DPP, SP2DK dari DPP Tahun 2024, dan SP2DK Outstanding (penerbitan LHP2DK) dengan memberikan porsi yang lebih besar atas penerbitan LHP2DK dibandingkan penelitian LHPt dengan harapan dapat menunjang penerimaan. Memberikan porsi yang lebih besar atas penerbitan LHP2DK dari DPP (50%) dibandingkan penerbitan LHP2DK dari DPP Tahun 2024 (30%) dan penerbitan LHP2DK dari SP2DK outstanding agar mendorong penyelesaian LHP2DK sejalan dengan kebijakan nasional dan hanya mengakui atas LHP2DK dengan realisasi, usulan pemeriksaan dan usulan bukper, agar lebih mendorong penyelesaian yang maksimal. Capaian yang diperoleh KPP Pratama Soreang atas IKU ini sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%.

Ranking KPP

132	445-PRATAMA SOREANG	120.00 %	120.00 %	120.00 %
133	951-PRATAMA SORONG	120.00 %	120.00 %	120.00 %
134	607-PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	120.00 %	120.00 %	120.00 %
135	001-PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	120.00 %	120.00 %	120.00 %
136	732-PRATAMA BANJARBARU	120.00 %	120.00 %	120.00 %
137	956-PRATAMA MERAUKE	120.00 %	120.00 %	120.00 %
138	315-PRATAMA BANGKA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
139	652-PRATAMA MALANG UTARA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
140	727-PRATAMA TANJUNG REDEB	120.00 %	120.00 %	120.00 %
141	926-PRATAMA WAINGAPU	120.00 %	120.00 %	120.00 %
142	915-PRATAMA PRAYA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
143	224-PRATAMA BINTAN	120.00 %	120.00 %	120.00 %
144	212-PRATAMA DUMAI	120.00 %	120.00 %	120.00 %
145	002-PRATAMA JAKARTA JATINEGARA	120.00 %	120.00 %	120.00 %
146	225-PRATAMA BATAM SELATAN	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meneliti dan merealisasikan SP2DK yang belum direspon wajib pajak;
 - 2) Mempercepat proses SP2DK melalui kegiatan konseling saat visit secara selektif;
 - 3) Meneliti berita acara konseling;
 - 4) Melaksanakan visit ke Wajib Pajak yang belum merespon SP2DK;
 - 5) Mempercepat penyelesaian LHP2DK atas SP2DK yang telah disetujui Wajib Pajak
 - 6) Menginput LHP2DK yang selesai ditindaklanjuti
- Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

KPP PRATAMA SOREANG	Pengawasan kepatuhan material yang efektif						
	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	114,48%	113,76%	113,76%	114,67%	114,67%	120,00%	120,00%
Capaian	114,48	113,76	113,76	114,67	114,67	120,00	120,00

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki formula berupa capaian pemanfaatan data STP ditambah capaian pemanfaatan data matching lalu dibagi dua. Pemanfaatan data STP memiliki formula berupa jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan dibagi jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya

diterbitkan lalu dikali 100% dan pemanfaatan data matching memiliki formula berupa jumlah WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan dikali 100%.

KPP Pratama Soreang memiliki realisasi atas pemanfaatan data STP sebesar 120,00% dan realisasi atas pemanfaatan data matching sebesar 120,00% sehingga capaian atas IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai 120,00%.

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Dashboard Rekapitulasi Kinerja DSTP Kinerja Data Matching Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Data STP dan Data Pemicu

Per Unit Kerja

1.4. Periode IV Demasa

Data update terakhir: 09-11-2025 00:00:00 WIB Data Matching: 31-10-2024 22:37:08 WIB

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP					Pemanfaatan Data Matching				
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	34.287	34.352	100,00%	20.651	4.163	24.238	120,00%	24.238	120,00%	
145 - PRATAMA SOREANG	2.505	2.595	103,55%	2.653	1.624	359	1.619	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN I	695	695	100,00%	652	428	62	615	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN II	135	135	100,00%	186	148	19	177	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN III	441	441	100,00%	231	162	59	230	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN IV	383	383	100,00%	276	219	93	219	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN V	440	440	100,00%	439	345	51	356	120,00%	120,00%	
SEKSI PENGAWASAN VI	482	482	100,00%	369	291	55	313	120,00%	120,00%	

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan untuk menindaklanjuti dafnom STP dan selain tahun berjalan yang disediakan oleh Kantor Pusat melalui aplikasi Approweb;
- 2) Memastikan untuk menindaklanjuti daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang disediakan oleh Kantor Pusat melalui aplikasi Approweb.

- Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

T/R	Pengawasan kepatuhan material yang efektif						
	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	101,40%	101,40%	115,10%	115,10%
Capaian	120,00	120,00	120,00	101,40	101,40	115,10	115,10

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu diukur dengan 3 (tiga) parameter, yaitu:

1) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Formulasi penghitungan dari komponen ini adalah membagi akumulasi poin penyelesaian laporan dengan akumulasi target poin yang kemudian hasilnya dikalikan 100%. Komponen ini memiliki bobot sebesar 30%.

2) Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Komponen ini memiliki bobot sebesar 40%.

3) Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan

Dalam komponen ini, bahan baku pemeriksaan yang dimaksud adalah Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). DSPP adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Formulasi penghitungan dari komponen ini adalah membagi nilai potensi yang diusulkan dengan target pemenuhan bahan baku yang kemudian

hasilnya dikalikan 100%. Komponen ini memiliki bobot sebesar 30%.

Dengan target komponen laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 100,00%, target komponen kualitas pelaksanaan komite kepatuhan sebesar 80,00%, dan target komponen persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 55,00%, KPP Pratama soreang mencapai realisasi sebesar 120,00% pada komponen laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, 86,20% pada komponen kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, dan 73,05% pada komponen persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Sehingga KPP Pratama Soreang berhasil mencapai realisasi IKU sebesar 115,10%.

Triwulan	Target Poin	Akumulasi Target Poin	Realisasi Poin	Akumulasi Realisasi Poin	Capaian
I	1	1	1,2	1,2	120%
II	1	2	1,2	2,4	120%
III	1	3	1,2	3,6	120%
IV	1	4	1,2	4,8	120%

Nilai PKM rapor unit kerja fungsi pengawasan	91,88%
nilai rapor unit kerja fungsi pemeriksaan	80,78%
nilai rapor unit kerja fungsi penagihan	88,21%
TOTAL	260,87%
Target Triwulan IV	80%
Komponen II	86,96%
Capaian	108,70%

TW	Nilai Potensi Usulan	Akumulasi Nilai Potensi Usulan	Target Angka Mutlak Usulan Tahun 2024	Trajectory	Target Nilai Usulan Per Triwulan	Realisasi	Target	Capaian
a	b	c	d	e	f=d*e	h=c/f	i	j=h/i
TW I	8.800.968.861	8.800.968.861	21.782.734.027	10%	2.178.273.403	404,03%	55%	735%
TW II	6.977.177.769	15.778.146.630	21.782.734.027	50%	10.891.367.014	144,87%	55%	263%
TW III	0	15.778.146.630	21.782.734.027	75%	16.337.050.520	96,58%	55%	176%
TW IV	134.140.577	15.912.287.207	21.782.734.027	100%	21.782.734.027	73,05%	55%	133%

Triwulan	Komponen 1 (Bobot 30%)	Komponen 2 (Bobot 40%)	Komponen 3 (Bobot 30%)	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian IKU
I	120%	-	-	100%	-	-
II	120%	-	-	100%	-	-
III	120%	79,76%	120%	100%	1,03904	103,90%
IV	120%	107,76%	120%	100%	1,15104	115,10%

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan untuk melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan dan melaporkan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu;
- 2) Menyiapkan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan;
- 3) Memastikan seluruh aktivitas fungsi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan yang tercantum pada rapor kinerja telah dilaksanakan.

7. Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

KPP PRATAMA SOREANG	Penegakan Hukum Yang Efektif						
	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	107,83%	107,83%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	107,83	107,83	120,00	120,00

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan 2 (dua) parameter, yaitu:

- 1) Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Tingkat efektivitas pemeriksaan memiliki bobot 60% yang diukur melalui 5 variabel antara lain:

- a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
 - b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
 - c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
 - d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
 - e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)
- 2) Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas penilaian memiliki bobot 40% yang diukur melalui 2 variabel antara lain:

- a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Detail Target dan tata cara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Dengan target komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 80,00% dan target komponen tingkat efektivitas penilaian sebesar 100,00%, KPP Pratama soreang mencapai realisasi sebesar 115,45% pada komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan 120,00% pada komponen tingkat efektivitas penilaian. Sehingga KPP Pratama Soreang berhasil mencapai realisasi IKU sebesar 120,00%.

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1 Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	98,47%	120,00%	18,00%
2 Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	101,82%	101,82%	25,45%
3 Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	189,74%	120,00%	36,00%
4 Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	94,75%	120,00%	30,00%
5 Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	90,00%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU					115,45%

*Max 120%

Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU) 120,00%

*Max 120%

Perhitungan IKU Penilaian

Input Kinerja dilakukan dengan urutan Input S-Print/ST -> Penilaian -> Input Laporan -> Validasi -> Selesai

2024 TAHUN

IKU Tingkat Efektifitas Penilaian > Kanwil DJP Jawa Barat I

No.	Kantor	Jumlah Laporan					Ketepatan Waktu					Traj. 2 Penilai	% Waktu	Capaian				
		Target Skor	Total Skor	% Skor	Traj. Penilai	Rasio Nilai	% Jml Lap	Request	Proaktif (DPP)	Proaktif (non-DPP)	NJOP-L				s.d. 1 bulan	s.d. 2 bulan	lebih dari 2 bulan	
16	KPP Pratama Soreang	14.00	32.10	229.29%	85%	120.00%	120.00	%	12	4	-	3	-	-	-	90%	120.00	120.00 %

CAPAIAN Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian:

Realisasi	229,29%
Tranjectory	85,00%
Capaian	269,75%

CAPAIAN Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu:

Realisasi	120,00%
Tranjectory	90,00%
Capaian	133,33%

Variabel	Realisasi	Bobot	Capaian
(Capaian komponen Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) *maks 120%	120,00%	60,00%	72,00%
(Capaian komponen Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%) *maks 120%	120,00%	40,00%	48,00%
			120,00%

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	101,79%	117,61%	115,45%	115,45%
b.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
e.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

**) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%*

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan;
- 2) Melakukan pembahasan DSPP dengan Account Representative dengan benar untuk mencegah selisih yang terlalu besar antara potensi dan nilai SKP yang terbit;
- 3) Memastikan proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn) tepat waktu.

- Tingkat Efektivitas Penagihan

KPP PRATAMA SOREANG	Penegakan Hukum Yang Efektif						
	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	12,88%	44,66%	44,66%	74,93%	74,93%	88,99%	88,99%
Capaian	85,87	120,00	120,00	120,00	120,00	118,65	118,65

Tingkat efektivitas penagihan adalah IKU untuk mengukur seberapa efektif tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penangguhan Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui pembobotan dari tindakan penagihan yang meliputi:

Variabel	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Tindakan Penagihan	119,19%	50%	59,60%
Tindak Lanjut DSPC	66,00%	20%	13,20%
Pencairan DSPC	53,97%	30%	16,19%
Total			88,99%
Indeks Capaian IKU = (88,99% / 75%) x 100%			118,65%

Pembobotan setiap tindakan penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran, dan Penjualan Barang Sitaan) dengan ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Variabel tindak lanjut DSPC (Daftar Sasaran Prioritas Pencairan) adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir WP yang masuk dalam DSPC tahun 2024 dimana tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. Variabel pencairan DSPC merupakan jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap WP DSPC. IKU tingkat efektivitas penagihan memiliki rincian:

Variabel 1

Komponen	Target	Realisasi	Persentase	Maksimal	Bobot	Capaian
ST	5.657	9.847	174,07%	120,00%	19,00%	22,80%
SP	2.085	2.444	117,22%	117,22%	29,00%	33,99%
Sita	68	158	232,35%	120,00%	8,00%	9,60%
Blokir	37	48	129,73%	120,00%	28,00%	33,60%
PBS	12	16	133,33%	120,00%	16,00%	19,20%
Cegah	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total						119,19%
Realisasi Variabel 1					50,00%	59,60%

Variabel 2

NAMA UNIT	JML WP DSPC	Target TL	SITA	PBS	CEGAH	BAYAR MINIMAL	LUNAS 2024	REALISASI TL	% TL	% TL (Max 120%)	% TL x Bobot 20%
PRATAMA SOREANG	100	50	9	4	0	27	9	33	66,00%	66,00%	13,20%

Variabel 3

NAMA UNIT	TARGET PENCAIRAN	REALISASI PENCAIRAN	% PENCAIRAN DSPC	MAKS 120%	BOBOT (30%)
PRATAMA SOREANG	8.688.830.500	4.689.166.030	53,97%	53,97%	16,19%

Atas IKU Efektivitas Penagihan KPP Pratama Soreang berhasil merealisasikan IKU ini dengan capaian 88,99% dengan target 75,00% sehingga mendapatkan indeks capaian sebesar 118,65%.

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan visit wajib pajak;
 - 2) Menerbitkan Surat Teguran;
 - 3) Menerbitkan Surat Paksa untuk STP yang belum dibayar;
 - 4) Menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemblokiran;
 - 6) Melakukan Penjualan Barang Sitaan;
 - 7) Melakukan tindak lanjut DSPC dan pencairan DSPC.
- Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Pengawasan

KPP PRATAMA SOREANG	Penegakan Hukum Yang Efektif						
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan

November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Nomor ND-2929/WPJ.09/2024 hal Penyampaian Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan maka telah dijadikan dasar perhitungan capaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Soreang. Dari target 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan, KPP Pratama Soreang telah menyelesaikan 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sehingga realisasi dan indeks capaian atas IKU ini sebesar 100%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I

JALAN ASIA AFRIKA NO. 114, BANDUNG 40261
TELEPON (022) 4230148-4231375; FAKSIMILE (022) 4235942; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-2929/WPJ.09/2024

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV Berlian Jaya
Tanggal : 6 Desember 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala KPP Pratama Soreang nomor ND-1170/KPP.0913/2024 tanggal 11 November 2024 terkait dengan Penyampaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama:

Nama : CV Berlian Jaya
NPWP : 71.584.499.9-445.000
Alamat : Kp Tambakan RT 003 RW 001 Rancamanyar,
Baleendah, Kab Bandung

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas usulan pemeriksaan bukti permulaan tersebut telah dilakukan Penelaahan oleh Tim Penelaah Kanwil DJP Jawa Barat I yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-31/USULBP/WPJ.0944/2024 tanggal 26 November 2024 (Terlampir).
2. Berdasarkan hasil penelaahan diketahui bahwa usul pemeriksaan bukti permulaan tersebut telah disetujui Tim Penelaah dan akan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP).
3. Sesuai dengan ketentuan pengakuan IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana telah kami sampaikan melalui Lampiran III angka 3 Nota Dinas Nomor ND-648/WPJ.09/2024 tanggal 1 April 2024 bersama ini disampaikan bahwa persetujuan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ini dapat dijadikan dasar perhitungan capaian IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Kurniawan Nizar

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta Fungsional Pemeriksa/ Account Representative untuk mencari data atau bahan pemeriksaan yang dapat diusulkan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan Bukti Permulaan;
- 2) Terus menindaklanjuti data usulan bukti permulaan yang telah dikirimkan ke Kanwil DJP Jawa Barat I.

8. Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas

Sasaran strategis data dan informasi yang berkualitas terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

KPP PRATAMA SOREANG	Data dan Informasi yang berkualitas						
	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	73,75%	87,50%	87,50%	97,50%	97,50%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki formula berupa persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan ditambah persentase penyediaan data potensi perpajakan lalu dibagi dua. Pada persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan, KPP Pratama Soreang telah menyelesaikan 8 Laporan Pengamatan dari target 4 Laporan Pengamatan sehingga mendapatkan realisasi sebesar 120%. Pada persentase penyediaan data potensi perpajakan formulir yang dihitung dalam IKU ini adalah Alket SE-11 KPDL, KPP Pratama Soreang telah menyediakan formulir tepat waktu sebanyak 1.846 formulir dari target sebanyak 1.290 formulir atau realisasi sebesar 143,10%. Dengan capaian realisasi kedua poin ini atas IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Soreang mendapatkan indeks capaian sebesar 120,00%. Dengan rincian:

Dashboard KPDL Dan Alket 2024

Dashboard KPDL SE-11 Alket SE-12 Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Berita Berita Januari Desember Filter

Data update terakhir: 07-01-2025 14:13:15 WIB

Unit Kerja	Data Objek	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Seleksi	Tepat Waktu	Tertambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	27.813	884	23.154	3.744	26.898	26.828	299	4.243	865	17.548	143,10%	90%	426,88%
443 - PRATAMA SOREANG	1.966	21	1.702	226	1.928	1.946	26	130	57	1.280	143,10%	90%	120,00%
SEKSI PENGAWASAN I	126	3	102	21	123	115	4	15	1	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN II	326	2	275	49	324	303	6	23	0	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN III	362	2	354	27	381	364	6	17	0	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN IV	353	7	293	51	344	315	17	34	22	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN V	360	5	300	57	357	349	6	28	9	0	-	-	-
SEKSI PENGAWASAN VI	403	2	376	25	399	382	6	14	6	0	-	-	-

REKAPITULASI LAPORAN PENGAMATAN 2024

Kanwil DJP Jawa Barat I

No.	Nama Unit Kerja	Target	Realisasi s.d 09 Desember 2024	persentase
1	KPP Madya Bandung	4	8	200,00%
2	KPP Madya Dua Bandung	4	4	100,00%
3	KPP Pratama Bandung Bojonagara	4	5	125,00%
4	KPP Pratama Bandung Cibeunying	4	7	175,00%
5	KPP Pratama Bandung Cicadas	4	5	125,00%
6	KPP Pratama Bandung Tegallega	4	5	125,00%
7	KPP Pratama Majalaya	4	4	100,00%
8	KPP Pratama Soreang	4	8	200,00%
9	KPP Pratama Cimahi	4	5	125,00%
10	KPP Pratama Purwakarta	4	9	225,00%
11	KPP Pratama Cianjur	4	3	75,00%
12	KPP Pratama Sukabumi	4	5	125,00%
13	KPP Pratama Ciamis	4	6	150,00%
14	KPP Pratama Garut	4	6	150,00%
15	KPP Pratama Sumedang	4	4	100,00%
16	KPP Pratama Tasikmalaya	4	4	100,00%
Jumlah		64	88	137,50%

Formula :

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

	realisasi (max 120%)	d disesuaikan bobot
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan (143,10%)	120,00%	60,00%
Persentase penyediaan data potensi perpajakan (200%)	120,00%	60,00%
		120,00%

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Seksi Pengawasan mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan kegiatan pengamatan, dan menyelesaikan Laporan Pengamatan atas Wajib Pajak yang telah dilaksanakan pengamatan;

- 2) Pengawasan perekaman data dari penelitian atau pengamatan ke dalam aplikasi alket di SIDJP;
 - 3) Mengkoordinasikan alket yang telah diinput untuk di approve oleh Kasi PKD;
 - 4) Kirim alket yang telah di approve melalui sistem SIDJPNINE;
 - 5) Kasi PKD melakukan validasi formal kurang dari 5 hari kerja.
- Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

KPP PRATAMA SOREANG	Data dan Informasi yang berkualitas						
	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	27,22%	40,67%	40,67%	63,00%	63,00%	84,00%	84,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Persentase penghimpunan data regional dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) terdiri dari data utama regional mapupun jenis data regional lainnya. Pada tahun 2024 KPP Pratama Soreang mendapatkan realisasi sebesar 82,25% dari target sebesar 55,00%, sehingga KPP Pratama Soreang mendapatkan indeks capaian sebesar 120,00%, dengan rincian sebagai berikut:

150 - KANWIL DJP JAWA BARAT I Diurutkan Berdasarkan : Unit Kerja Tahun Data : Semua

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	150 - KANWIL DJP JAWA BARAT I (DATA PROPINSI)	15	9	5	30	15	4	78,45	Lihat
2	405 - KPP PRATAMA SUKABUMI	27	23	17	39	34	14	79,8	Lihat
3	406 - KPP PRATAMA CIANJUR	15	15	10	14	14	12	95,42	Lihat
4	409 - KPP PRATAMA PURWAKARTA	11	11	8	21	17	4	90,15	Lihat
5	421 - KPP PRATAMA CIMAH	18	15	12	31	27	13	93,38	Lihat
6	422 - KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA	9	5	4	17	16	4	65,59	Lihat
7	423 - KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	9	5	4	17	16	4	65,59	Lihat
8	425 - KPP PRATAMA TASIKMALAYA	24	20	15	34	31	17	83,56	Lihat
9	428 - KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	9	5	4	17	16	4	65,59	Lihat
10	429 - KPP PRATAMA BANDUNG CICALADAS	9	5	4	17	16	4	65,59	Lihat
11	442 - KPP PRATAMA CIAMIS	39	24	20	54	43	26	75,86	Lihat
12	443 - KPP PRATAMA GARUT	14	12	4	21	16	4	62	Lihat
13	444 - KPP PRATAMA MAJALAYA	11	10	7	20	17	4	82,25	Lihat
14	445 - KPP PRATAMA SOREANG	11	10	7	20	17	4	82,25	Lihat
15	446 - KPP PRATAMA SUMEDANG	9	9	9	18	10	10	88,5	Lihat

Back Excel

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Penyelesaian Laporan

Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP dan KPP Pratama Majalaya terkait data dari pemerintah daerah;

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

KPP PRATAMA SOREANG	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,45	117,45
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,45	117,45

Pada IKU Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dalam mencari realisasinya terdiri dari 2 komponen yaitu komponen 1 berupa Tingkat Kualitas Kompetensi dan komponen 2 berupa Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan.

Pada komponen 1 Tingkat Kualitas Kompetensi dalam pelaksanaannya terdiri 3 aspek yang diperhitungkan. Aspek 1 yaitu tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural memiliki bobot 30% atas IKU dengan memperhitungkan Pejabat Struktural yang telah memenuhi JPM \geq 80%, Seluruh Pejabat Struktural di KPP Pratama Soreang telah memenuhi JPM \geq 80% sehingga pada aspek 1 memiliki realisasi sebesar 100%. Aspek 2 yaitu Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional memiliki bobot 35%, bagi Pelaksana uji kompetensi teknis berupa Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan Tahun 2024 dan bagi Fungsional berupa Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang, seluruh pelaksana dan fungsional di KPP Pratama Soreang yang mengikuti uji kompetensi telah dinyatakan lulus sehingga pada aspek 2 memiliki realisasi sebesar 100%. Aspek 3 yaitu Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai memiliki bobot 35%, pegawai diwajibkan untuk dapat memenuhi seluruh jam pelajaran pegawai yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal

Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya, pegawai KPP Pratama Soreang telah memenuhi jam pelajaran baik jam pelajaran tatap muka maupun e-learning dengan realisasi 109,76%. Dengan bobot dari masing masing aspek, maka realisasi pada komponen 1 sebesar 103,42% dengan target sebesar 90% menghasilkan capaian tingkat kualitas kompetensi sebesar 114,91%, dengan rincian sebagai berikut:

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024								
KPP Pratama Soreang								
No	Nama	NIP	TMT Pensiun	Unit Eselon II	UNIT KERJA	JABATAN	JPM MANAGERIAL	KATEGORI
1	GUNUNG HERMINTO SISWANTORO	196711201987031002	2025	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon III	88,89%	Diatas Standar
2	EVI PANIAITAN	197310311994032001	2031	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	94,44%	Diatas Standar
3	SRI SOEGIH BUDI RAHAYU	196909061995032001	2027	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	83,33%	Diatas Standar
4	SULASTINI	197003231995032001	2028	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	88,89%	Diatas Standar
5	CAHYA MULYANI	197005311995092001	2028	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	83,33%	Diatas Standar
6	FARIDA RAKHMADANI HASIBUAN	197509181996022001	2033	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	111,11%	Diatas Standar
7	HARRING HIKMAT SATARI	197012261997031001	2029	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	94,44%	Diatas Standar
8	ASRUL SJAM	197108231999031001	2029	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	100,00%	Diatas Standar
9	BUDHI TJAHYADI	197010251997031000	2028	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	83,33%	Diatas Standar
10	SALAMON CARLO	197004131997031001	2028	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	88,89%	Diatas Standar
11	ACHMAD HARISA ILMIAWAN	197701071999031001	2035	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Eselon IV	94,44%	Diatas Standar
12	DWI YOGA WARDANA	199206172014111003		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Account Representative (AR)		LULUS
13	HANIATUN MUSYAROFAH	199909292018122004		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Pelaksana		LULUS
14	IAJU FITRI UTAMI	200001142018122002		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Pelaksana		LULUS
15	LONIKA AGIAN	199510312016122001		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Pelaksana		LULUS
16	REYNA DWI PRATIWI	199206172014112001		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Account Representative (AR)		LULUS
17	SHINTHA TRI ALFIAH	199509222016122002		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Account Representative (AR)		LULUS
18	TEGUH SETIA FEBRIAN	199510052015121003		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Pelaksana		LULUS
19	ULTAH RIFKI YUNILA SARI	199805092018122001		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Pelaksana		LULUS
20	VICMEL BINATUREN	198802022009121003		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Account Representative (AR)		LULUS
21	WILDAN MUHAMAD FIKRI	199611282016121004		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Pelaksana		LULUS
22	YUSUP YULIANDA	199207182014021002		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Account Representative (AR)		LULUS
23	IWAN DIANTO	198001182001121002		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Pemeriksa Pajak Penyella		LULUS
24	ANGGI RAMDHANI	199203292015021002		Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Soreang	Asisten Penilai Pajak Mahir		LULUS

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan logout dan pilih tahun anggaran pada halaman login.

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampel Tatap Muka			Capaian Jampel e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	
1	KPP Pratama	0	0,00	24	26,4	110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2,2	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
2	Seksi Pelayanan	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	312	343,2	110,00	120	132	110,00	456	501,6	110,00	38	41,8	110,00	110,00	110,00	
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	240	264	110,00	0	0,00	264	290,4	110,00	22	24,2	110,00	110,00	110,00		
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	96	105,6	110,00	0	0,00	120	132	110,00	10	11	110,00	110,00	110,00		
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Pengalihan	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	192	211,2	110,00	24	26,4	110,00	240	264	110,00	20	22	110,00	110,00	110,00	
6	Seksi Pengawasan I	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	168	184,8	110,00	0	0,00	192	211,2	110,00	16	17,6	110,00	110,00	110,00		
7	Seksi Pengawasan II	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	168	184,8	110,00	0	0,00	192	211,2	110,00	16	17,6	110,00	110,00	110,00		
8	Seksi Pengawasan III	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	144	158,4	110,00	0	0,00	168	184,8	110,00	14	14,3	102,14	106,86	109,86		
9	Seksi Pengawasan IV	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	144	158,4	110,00	0	0,00	168	184,8	110,00	14	15,2	108,57	109,43	109,43		
10	Seksi Pengawasan V	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	144	158,4	110,00	0	0,00	168	184,8	110,00	14	15,4	110,00	110,00	110,00		
11	Seksi Pengawasan VI	0	0,00	0	0,00	24	26,4	110,00	192	211,2	110,00	0	0,00	216	237,6	110,00	18	19,8	110,00	110,00	110,00		
12	Fungsional	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	336	369,6	110,00	336	369,6	110,00	28	30,8	110,00	110,00	110,00	
TOTAL		0	0,00	24	26,4	110,00	240	264	110,00	1800	1980	110,00	480	528	110,00	2544	2798,4	110,00	212	231,9	109,39	109,76	

ASPEK 1 (30%)		ASPEK 2 (35%)		ASPEK 3 (35%)
= (10/10)X100%		= ((13/13)X100%)		
100%		100%		109,76%
30,00%	+	35,00%	+	38,42%
Komponen I - Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi:				103,42%
Komponen I - Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi (Q4=90%):				114,91%

Pada komponen 2 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan, KPP Pratama Soreang diwajibkan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Perhitungan atas komponen ini adalah 60% dari pelaksanaan kegiatan ditambah 30% feedback peserta dan 10% nilai kepatuhan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan kebintalan di KPP Pratama Soreang telah melebihi target dengan realisasi sebesar 120%, bukti pelaksanaan kegiatan kebintalan berupa laporan pelaksanaan kebintalan yang telah KPP Pratama Soreang kirim ke Kanwil DJP Jawa Barat I selalu dilaporkan sebelum batas waktu sehingga nilai kepatuhan pelaporan KPP Pratama Soreang sebesar 110%. Pegawai telah diminta mengisi survei terkait Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan Pejabat Administrator, hasil atas survei tersebut adalah 60% dan dijadikan realisasi feedback peserta. Dengan bobot dari masing masing aspek, maka realisasi pada komponen 2 sebesar 112% dengan target sebesar 80% menghasilkan capaian tingkat kualitas kompetensi sebesar 140%, dengan batas maksimal capaian yang dapat diakui sebesar 120%.

Setelah mendapatkan realisasi dari masing masing komponen, maka realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebagai berikut:

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
= (114,91% x 50%) + (120,00% x 50%)
117,45%

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Penyelesaian Laporan

Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan Pejabat Struktural memiliki JPM ≥ 80 , dan menyelesaikan Assessment Center yang diikuti;
- 2) Memberikan motivasi dan pengawasan pada pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis;
- 3) Menghimbau dan mengawasi pegawai untuk menyelesaikan pemenuhan jam pelajaran sesuai jangka waktu yang diberikan;
- 4) Mengadakan berbagai kegiatan Pembinaan mental secara teratur sesuai ruang lingkup yang diberikan.

- Indeks Penilaian Integritas Unit

KPP PRATAMA SOREANG	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	93,70	93,70
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	110,24	110,24

IKU ini adalah survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan dengan melakukan survey kepada Wajib Pajak yang telah mendapat pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak di KPP Pratama Soreang. Pada Triwulan III atas IKU ini menggunakan realisasi berupa pengiriman Nomta Dinas Penyampaian Longlist Responden yang telah dikirimkan sebelum batas waktu sehingga menghasilkan realisasi Triwulan III 100%. Pada Triwulan IV terdiri dari Survey dilakukan langsung oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan menghubungi langsung Wajib Pajak yang telah tercantum pada Longlist Responden. Atas IKU ini KPP Pratama Soreang mendapat nilai 93,70 dari target yang diberikan yaitu 85,00, sehingga mendapat indeks capaian sebesar 110,24%.

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan prima sesuai standar pelayanan kepada wajib pajak;

- 2) Penanaman Nilai-Nilai Kementerian Keuangan terutama nilai integritas kepada pegawai melalui rapat motivasi bulanan.
- Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

KPP PRATAMA SOREANG	Organisasi yang berkinerja tinggi						
	09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00%	47,00%	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	28,13	51,68%	51,68%	83,86	83,86	97,34	97,34
Capaian	120,00	109,96	109,96	119,80	119,80	108,15	108,15

Pada IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko dalam mencari realisasinya terdiri dari 2 komponen yaitu komponen 1 berupa Implementasi Manajemen Kinerja dan komponen 2 berupa Implementasi Manajemen Risiko. Pada Komponen 1 KPP Pratama Soreang telah melaksanakan Imbauan terkait Manajemen Kinerja dan Budaya Kinerja yang disampaikan oleh Kepala Kantor, Kepala Subbagian Uum dan Kepatuah Internal serta Pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal secara teratur disertai penyusunan dan penyampaian laporan, KPP Pratama Soreang juga telah melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai batas waktu dan pengirimkan seluruh lampiran kegiatan DKO secara lengkap. Setelah dilaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 KPP Pratama Soreang mendapatkan Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja sebesar 13,84%. Pada Komponen II KPP Pratama Soreang telah membuat dan menyampaikan Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung tepat waktu pada aplikasi Periskop, selalu melaksanakan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya, menyampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu pada aplikasi Periskop, serta melaksanakan seluruh Rencana Mitigasi Risiko sampai akhir Triwulan IV dengan realisasi rencana mitigasi risiko sebesar 100%.

Realisasi atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko	+	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
	=	33,5	+	50	+	13,84
Realisasi TW IV 2024	=	97,34				
Target TW IV 2024	=	90				
Capaian TW IV 2024	=	108,16%				

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- 1) Manajemen Risiko dengan melakukan mitigasi yang telah direncanakan;
- 2) Melakukan permintaan data dan informasi mengenai capaian IKU;
- 3) Membuat Nota Dinas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi setiap triwulan;
- 4) Pemantauan Nilai Kinerja Organisasi setiap bulan;
- 5) Mempresentasikan DKO dan NKO setiap Triwulan;
- 6) Penyampaian imbauan terkait Manajemen Kinerja kepada pegawai.

10. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

KPP PRATAMA SOREANG	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
	010a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	101,04	101,04	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	120,00	101,04	101,04	120,00	120,00	120,00	120,00

Sasaran strategis Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun anggaran 2024, KPP Pratama Soreang mendapatkan alokasi anggaran pada DIPA petikan 2024 sebesar Rp5.767.262.000 yang terdiri dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp815.045.000, belanja modal sebesar Rp95.425.060 dan pagu anggaran belanja barang sebesar Rp4.856.791.940.

Target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) Tahun 2024 adalah 120 (indeks 100) yang didapatkan dari pembobotan antara nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) dan nilai kinerja atas perencanaan anggaran (SMART).

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**} (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA $<$ 80

Realisasi IKU kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 KPP Pratama Soreang sebesar 120.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN **Desember** [Sampai](#)

[Download PDF](#) [Download Excel](#)

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dipenuhi SPH (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi RPN	Deviasi Halaman III DIPA	Penyempitan Anggaran	Belanja Konvensional	Penyetaraan Tagihan	Penghasilan UP dan TDP	Capaian Output	Nilai				
1	Desember	032	025	420040	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG	Nilai	100,00	91,31	96,52	100,00	100,00	100,00	100,00	98,08	100%	0,00	98,08	
						Bobot	10	25	20	10	10	10	25					
						Nilai Akhir	10,00	13,77	19,30	10,00	10,00	10,00	25,00					
						Nilai Aspek	95,91			99,13			100,00					

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker [Download Excel](#)

Tampilkan 1 dari 1 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Effisiensi SBK	
1	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG		100,00	100,00	100,00	100,00	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri [Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

Apabila dilihat dari tabel Indikator Pelaksanaan Anggaran, satuan kerja gagal mencapai poin maksimal pada indikator penyerapan anggaran dan deviasi. Hal ini disebabkan diantaranya karena:

1. Masih kurangnya pemahaman bendahara mengenai penentuan RPD di awal tahun, sehingga membuat deviasi yang sangat besar di Triwulan I.
2. Pada akhir triwulan IV, penyerapan anggaran telah mencapai 100% dari target, akan tetapi kurangnya nilai penyerapan di Triwulan II menyebabkan nilai akhir komponen tidak maksimal.

Sementara untuk nilai SMART, satuan kerja mendapatkan nilai maksimal 100

Meskipun satuan kerja gagal mencapai poin maksimal pada 2 komponen IKPA, satuan kerja berhasil mendapatkan capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120, dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai IKKPA} &= 50\% \text{ Capaian IKPA} + 50\% \text{ Capaian SMART} \\ &= 50\% (98.08) + 50\% (100.00) \\ &= 99.04 \\ \text{Capaian IKKPA} &= 120\end{aligned}$$

Adapun beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dilaksanakan dan akan terus diterapkan sehingga Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran melebihi target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyerapan anggaran untuk belanja barang minimal 95%;
2. Melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan tim keuangan dalam mengkoordinir RPD setiap bulan dan memperoleh penyerapan yang maksimal.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perkantoran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang memperoleh dana berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 15 dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG 636040

Tgl Data : 24/01/25 12:56 AM
Tgl Cetak : 24/01/25 9:47 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_salker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	1,408,451,523,000	1,162,665,925,784	(245,785,597,216)	83	1,132,736,327,000	1,190,203,260,882	(57,466,933,882)	105
1. Pajak Dalam Negeri	1,408,451,523,000	1,162,665,925,784	(245,785,597,216)	83	1,132,736,327,000	1,190,203,260,882	(57,466,933,882)	105
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,520,000	3,701,612	(3,818,388)	49	0	142,056,776	(142,056,776)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,520,000	3,701,612	(3,818,388)	49	0	142,056,776	(142,056,776)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,408,459,043,000	1,162,669,627,396	(245,789,415,604)	83	1,132,736,327,000	1,190,345,317,658	(57,608,990,658)	105
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	5,767,262,000	5,532,367,857	(234,894,143)	96	5,950,953,000	5,180,678,703	770,274,297	87
1. Belanja Pegawai	815,045,000	762,424,000	(52,621,000)	94	851,350,000	807,188,000	44,162,000	95
2. Belanja Barang	4,856,759,000	4,674,518,797	(182,240,203)	96	5,050,391,000	4,328,551,733	721,839,267	86
3. Belanja Modal	95,458,000	95,425,060	(32,940)	100	49,212,000	44,938,970	4,273,030	91
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG 636040

Tgl Data : 24/01/25 12:56 AM
Tgl Cetak : 24/01/25 9:47 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_salker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fisikal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,767,262,000	5,532,367,857	(234,894,143)	96	5,950,953,000	5,180,678,703	770,274,297	87
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

BANDUNG BARAT, 24 Januari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUJASA PENGGUNA ANGGARAN

GUNUNG HERMINTO SISWANTORO
NIP 196711201987031002

BAB IV

PERMASALAHAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Identifikasi Permasalahan

Rencana strategis disusun untuk mewujudkan visi telah ditetapkan. Dalam penyusunannya memperhatikan permasalahan yang dihadapi unit organisasi baik yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Pada era globalisasi sekarang ini perubahan dari lingkungan eksternal terjadi begitu cepat baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu organisasi harus cepat pula dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Bersumber dari kondisi tersebut timbullah permasalahan yang harus diantisipasi pada tahun 2025. Permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Soreang adalah:

1. Permasalahan yang Bersumber dari Lingkungan Eksternal
 - a. Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pajak
 - Implementasi kebijakan perpajakan baru yang memerlukan adaptasi cepat dari wajib pajak dan petugas KPP.
 - Ketidakpastian peraturan akibat dinamika politik dan ekonomi.
 - b. Digitalisasi dan Teknologi
 - Tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang, seperti sistem pajak berbasis blockchain atau artificial intelligence.
 - Ancaman keamanan siber yang meningkat terhadap data perpajakan.
 - c. Kepatuhan Wajib Pajak
 - Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor UMKM dan ekonomi digital.
 - Munculnya ekonomi informal dan shadow economy yang sulit terjangkau oleh sistem perpajakan.
 - d. Kondisi Ekonomi Global dan Domestik
 - Ketidakpastian ekonomi global seperti resesi, inflasi, atau ketegangan geopolitik yang berdampak pada penerimaan pajak.

- Fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi kebijakan pajak internasional.
- e. Perubahan Sosial dan Budaya
- Perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada digitalisasi dan layanan serba instan yang menuntut modernisasi layanan pajak.
 - Kurangnya literasi pajak di kalangan generasi muda dan pekerja informal.
2. Permasalahan yang Bersumber dari Lingkungan Internal
- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kesenjangan kompetensi SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kompleksitas regulasi pajak.
 - Motivasi dan produktivitas pegawai yang dipengaruhi oleh beban kerja dan kesejahteraan.
- b. Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi
- Sistem administrasi perpajakan yang terkadang belum sepenuhnya terintegrasi antarunit kerja.
 - Keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi baru dan pemeliharaan sistem yang andal.
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Tantangan dalam pengawasan wajib pajak besar yang memiliki strategi penghindaran pajak kompleks.
 - Keterbatasan data yang akurat untuk menindak wajib pajak yang tidak patuh.
- d. Koordinasi Antarinstansi
- Kurangnya sinergi antara KPP dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, bea cukai, dan lembaga keuangan.
 - Tumpang tindih kebijakan yang menghambat efektivitas pengumpulan pajak.
- e. Manajemen Risiko dan Tata Kelola Organisasi
- Kebutuhan perbaikan dalam mitigasi risiko operasional dan strategis KPP.
 - Adaptasi terhadap perubahan model bisnis wajib pajak yang terus berkembang.

B. Strategi Dan Kebijakan

Masalah-masalah yang telah disebutkan di atas dapat diatasi dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Berikut adalah strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan kebijakan yang langsung mempunyai pengaruh terhadap pencapaian penerimaan pajak dan yang tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Fokus strategi adalah terhadap yang langsung berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

1. Fokus Strategi

- a. Meningkatkan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti Coretax;
- b. Memenuhi standar pelayanan;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan standar penanganan pengaduan WP;
- e. Meningkatkan frekuensi penyuluhan;
- f. Memetakan kepatuhan WP;
- g. Menggali potensi perpajakan dengan cara persuasive;
- h. Menjaring WP Orang Pribadi Karyawan dari WP terdaftar;
- i. Memprioritaskan pencairan tunggakan berdasarkan penunggak terbesar dan umur tunggakan;
- j. Melaksanakan metode analisis risiko sebagai dasar pemeriksaan;
- k. Meningkatkan mutu hasil pemeriksaan;
- l. Melaksanakan sistem administrasi pemeriksaan pajak.

2. Perkembangan Sumber Daya

- a. Semua komputer terkoneksi dengan aplikasi teams dan aplikasi internal DJP;
- b. Menyediakan koneksi jaringan internet;
- c. Memanfaatkan aplikasi yang tersedia;
- d. Efisiensi belanja sesuai aturan yang berlaku;
- e. Melaksanakan updating data pada Sistem Informasi Kepegawaian;
- f. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
- g. Melaksanakan sistem pengukuran kinerja individual;
- h. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat;
- i. Memberikan hak-hak pegawai;
- j. Mengawasi pelaksanaan kewajiban.

BAB V

PENUTUP

Seluruh materi yang tersaji dalam Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang merupakan perpaduan antara sebuah komitmen dan tanggung jawab dari sebuah institusi pemerintah kepada semua pihak. Komitmen dan tanggung jawab tersebut tidak saja diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif seperti pemenuhan target penerimaan, namun lebih penting adalah sejauh mana institusi tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tahun 2024 yang disajikan dalam bentuk LAKIN sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), yang analisisnya pada saat ini hanya sampai pada hal-hal yang bersifat kuantitatif berupa *input*, *output*, dan *outcome*. Hal ini mengandung maksud bahwa kegiatan yang dilakukan bukan hanya memproduksi keluaran (*output*) semata, tetapi keluaran dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sampai pada hasil yang diinginkan walaupun hasil ini masih merupakan langkah awal bagi langkah-langkah analisis berikutnya yaitu analisis dampak dan manfaat.

Ultimate goal KPP Pratama Soreang tahun 2024 berupa target penerimaan pajak berdasarkan APBN tahun 2023 (UU No. 19 Tahun 2023) sebesar Rp1.297.569.286.047 atau Rp1.349.997.100.000 menurut target internal DJP. Dari target tersebut KPP Pratama Soreang berhasil mengumpulkan Rp1.356.459.534.721, 104,54% dari target APBN tahun 2024 atau 100,48% dari target internal DJP tahun 2024. Seluruh IKU-IKU lainnya yang diampu KPP Pratama Soreang pada tahun 2024 juga telah tercapai, sehingga pada tahun 2024 KPP Pratama Soreang dapat mencapai NKO sebesar 109,13.

Dalam menghadapi tahun 2025, KPP Pratama Soreang telah menyiapkan beberapa langkah dalam mendukung pelaksanaan kinerja yang optimal pada tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi secara rutin dan berkala;
- 2) Meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya pada masa transisi Coretax;
- 3) Membuka Loker Pelayanan Pajak di Mall Pelayanan Publik lebih cepat dari jadwal tahun-tahun sebelumnya;
- 4) Melakukan himbauan atau sosialisasi pelaporan SPT Tahunan secepatnya.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun kepada semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Soreang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

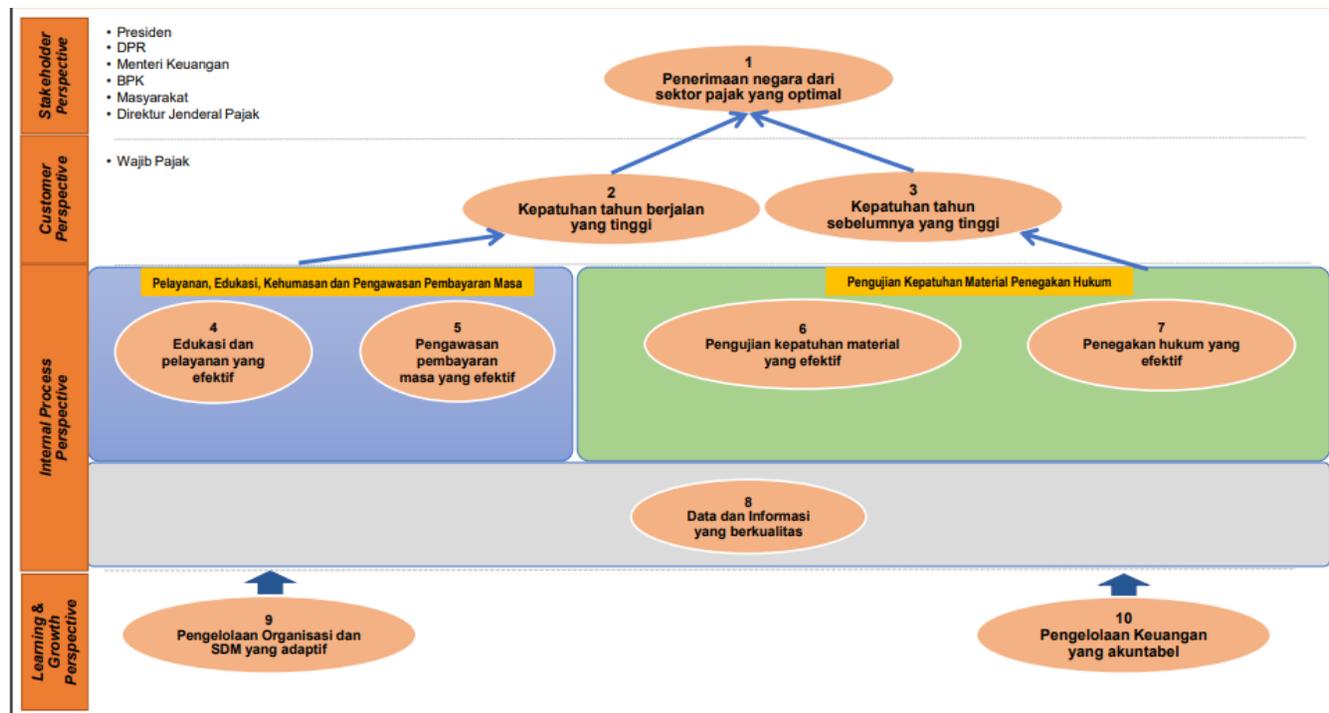


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-20/WPJ.09/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program</i> Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.090.112.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 448.164.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 277.799.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 364.149.000
<i>B. Program</i> Dukungan Manajemen	Rp 4.718.899.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.862.105.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 856.794.000
Total	Rp 5.809.011.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Erna Sulistyowati

Bandung Barat, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Soreang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Gunung Herminto Siswantoro



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Bandung Barat, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Soreang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Gunung Herminto Siswanto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Meningkatkan pemberian layanan prima sesuai standar pelayanan kepada Wajib Pajak	Wajib Pajak mendapatkan kepuasan saat menerima pelayanan dan penyuluhan	Q1-Q4 Meningkatkan pemberian layanan prima sesuai standar pelayanan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui media lainnya	Kepuasan Wajib Pajak	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	Rp0
2.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Melakukan revisi anggaran untuk menutup pos anggaran yang sudah minim; Melakukan koordinasi dengan setiap seksi untuk menyusun rencana kerja keuangan	Pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas	Q1-Q4 Melakukan koordinasi terkait perencanaan anggaran (RPD), menginventaris belanja yang belum terserap anggaran sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal, melakukan penarikan dana sesuai RPD	Kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp0

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Gunung Herminto Siswantoro



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Gunung Herminto Siswanto	NAMA	Erna Sulistyowati	
NIP	196711201987031002	NIP	196602151992032001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
-----	--	--	-----	----------------------------------

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA	
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Gunung Herminto Siswanto
196711201987031002



Ditandatangani secara elektronik
Erna Sulistyowati
196602151992032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	108 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Gunung Herminto Siswantoro
196711201987031002



Ditandatangani secara elektronik
Erna Sulistyowati
196602151992032001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-20A/WPJ.09/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-20/WPJ.09/2024 tanggal 01 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N / 10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I



Ditandatangani Secara Elektronik

Kurniawan Nizar

NIP 196604291993101001

Bandung Barat, 2 September 2024

Kepala KPP Pratama Soreang



Ditandatangani Secara Elektronik

Gunung Herminto Siswantoro

NIP 196711201987031002



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala KPP Pratama Soreang Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Gunung Herminto Siswantoro
NIP 196711201987031002

Bandung Barat, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kurniawan Nizar
NIP 196604291993101001

